

# **INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**


## **PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



### **UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI PROVINSI LAMPUNG**

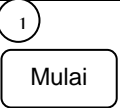

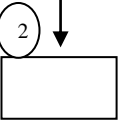



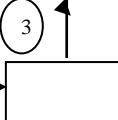

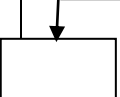
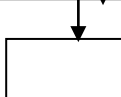
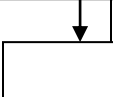
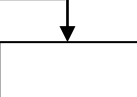

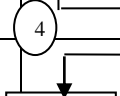
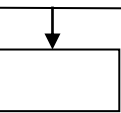
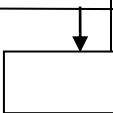
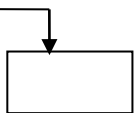
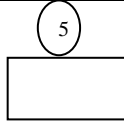



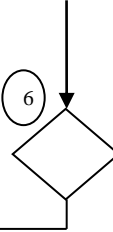

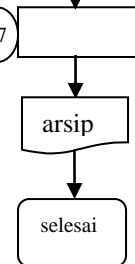
**INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**  
**Jalan Dr.Susilo No.42 Teluk Betung**

Nomor SOP	: 700/231.a/IV.01/2022
Tgl Pembuatan	: 03 Februari 2022
Tgl Revisi	: -
Tgl Pengesahan	: 04 Februari 2022
Disahkan Oleh	: INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG
	 <b>Ir.FREDY,SM.MM.CGCAE</b> Pembina Utama Madya/ IV.d NIP.19650202199010 1001
Nama SOP	: Unit Pemberantasan Saber Pungli Provinsi Lampung

<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Memahami Tugas dan Fungsi Saber Pungli Provinsi Lampung ; 2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Saber Pungli Provinsi Lampung; dan; 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Gratifikasi dan Tindak Pidana Korupsi.	<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; 2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli; 4. Keputusan Menko Polhukam Ri No. 37/2023 tentang Perubahan Atas Kep Menko Polhukam Ri No. 5/2023 tentang Satgas Saber Pungli. 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 80/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 370/IV.01/HK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan Liar.
<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Buku Peraturan Perundang-undangan; 2. Komputer/Laptop dan Printer; 3. Alat Tulis Kantor.	<b>Keterkaitan</b> - Irwasda Polda Lampung - Aswas Kejati Lampung - Irban Wilayah V

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP)  
PROVINSI LAMPUNG**

Uraian prosedur	Pelaksana						Mutu baku			ket	
	sekretariat	Sub unit inteligen	Sub unit pencegahan	Sub unit penindakan	Sub unit yustisi	Kelompok ahli	Ketua pelaksana	Persyaratan/perengkapan	waktu		output
1. Pengaduan dan Laporan dan informasi lain terkait dengan pungutan liar yang diterima di posko.											 Mulai/ selesai
2. Dilakukan penelitian, pencatatan, pengarsipan oleh sekretaris dan dilaporkan kepada ketua pelaksana											 Proses
3. Tindak lanjut berupa disposisi ketua pelaksana kepada kelompok ahli untuk dilakukan kajian dilaporkan kepada ketua pelaksana untuk diteruskan kepada sub unit yang menangani											 Pengambilan/keputusan
4. Kepada unit satgas yang ditunjuk menindak lanjuti dengan melaksanakan kegiatan sesuai tugas masing-masing											 Sesuai tugas yang ditunjuk
5. Hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh sub unit yang ditunjuk, dituangkan dalam bentuk laporan, disajikan kepada ketua pelaksana UPP saber pungli											 Sesuai tugas yang ditunjuk

6.	Ketua pelaksana mengambil kebijakan apakah pengaduan tersebut selesai untuk diarsipkan atau harus ditindak lanjuti lebih lanjut ke satgas yang lain sesuai dengan alur dan tembusan ke kelompok ahli											 Koordinasi
7.	Ketua pelaksana meminta kepada sekretaris untuk mengarsipkan laporan hasil tindak lanjut dan meregister kedalam buku agenda pencegahan /pemeriksa											

**INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**



**Ir.FREDY,SM.MM.CGCAE**  
**Pembina Utama Madya/ IV.d**  
**NIP.19650202199010 1001**